

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Informasi yang disajikan perusahaan dalam laporan keuangan seharusnya dapat memberikan gambaran kinerja ekonomi dan keuangan perusahaan yang sebenarnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan meliputi kreditor, investor, lembaga keuangan, pemerintah dan lainnya. Akan tetapi hal yang sering terjadi adalah pengelola perusahaan (manajer) lebih dominan menguasai informasi keuangan perusahaan dibandingkan pihak lainnya, termasuk para pemegang saham. Hal tersebut seharusnya tidak boleh terjadi karena informasi akuntansi yang berhubungan dengan kinerja perusahaan merupakan kebutuhan yang paling mendasar pada proses pengambilan keputusan yang dibutuhkan investor di pasar modal. Salah satu sumber informasi mengenai kinerja keuangan adalah laporan keuangan yang dapat memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2012).

Walaupun semua isi dari laporan keuangan bermanfaat bagi para pemakai, namun biasanya perhatian investor lebih banyak ditujukan pada informasi mengenai laba. Hal tersebut terjadi karena seringkali perhatian investor yang hanya terpusat pada laba ini membuatnya tidak memperhatikan prosedur yang dilakukan

manajemen untuk menghasilkan informasi laba tersebut (Beattie dkk., 1994; dalam Rahmawati dan Muid, 2012). Pentingnya informasi laba tersebut disadari oleh manajemen sehingga manajemen cenderung melakukan *dysfunctional behaviour* (perilaku tidak semestinya) untuk menunjukkan peningkatan dalam kinerja perusahaannya. Tindakan *dysfunctional behaviour* yang dilakukan manajemen sangat berkaitan dengan teori keagenan yang menyatakan adanya perbedaan kepentingan antara manajemen (agen) dan pemegang saham (*principal*) (Jin dan Machfoedz, 1998; dalam Mudjiono, 2010). Pihak manajemen selaku pengelola perusahaan lebih memiliki banyak informasi dibandingkan pemilik perusahaan seringkali memanfaatkan kondisi tersebut untuk melakukan manipulasi laba atau pengelolaan laba (*earning management*).

Menurut Sugiri (1998, dalam Christanti, 2012), definisi manajemen laba dapat dibagi menjadi dua, yaitu (1) definisi secara sempit, manajemen laba dalam hal ini hanya berkaitan dengan pemilihan metode akuntansi. Manajemen laba didefinisikan sebagai perilaku manajer untuk “bermain” dengan komponen *discretionary accrual* dalam menentukan besarnya laba, (2) definisi secara luas, manajemen laba merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan (mengurangi) laba yang dilaporkan saat ini atas suatu unit di mana manajer bertanggung jawab, tanpa mengakibatkan peningkatan (penurunan) profitabilitas ekonomis jangka panjang unit tersebut. Dari dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen laba adalah upaya mengendalikan transaksi akrual dengan cara

meningkatkan atau menurunkan laba yang dilakukan oleh para manajer.

Perilaku perusahaan dalam melakukan manajemen laba tersebut dapat dipengaruhi beberapa hal yang salah satunya adalah *taxation motivations*. Hal ini berkaitan dengan besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Apabila tarif pajak semakin besar maka perusahaan akan berusaha untuk memanipulasi laba agar terlihat rendah dan sebaliknya apabila tarif pajak semakin kecil maka laba yang dihasilkan tidak akan dimanipulasi. Dalam artian ini, perusahaan akan lebih memilih metode akuntansi yang dapat menghasilkan laba yang dilaporkan lebih rendah dari seharusnya, sehingga pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah menjadi lebih rendah (Scott, 2006:369). Di dalam ilmu akuntansi hal ini dapat diterima karena akuntansi menganut prinsip basis akrual dimana pada dasarnya basis akrual digunakan untuk pengakuan pendapatan (*revenue*) dan beban (*expense*) yang dilakukan pada periode dimana seharusnya pendapatan dan beban tersebut terjadi tanpa memperhatikan waktu penerimaan/pengeluaran kas dari pendapatan/beban yang bersangkutan.

Aktivitas manajemen laba tidak hanya terjadi di negara berkembang seperti Indonesia bahkan di negara maju seperti Amerika Serikat juga terjadi aktivitas tersebut, dimana beberapa perusahaan di Amerika Serikat melakukan penundaan pengakuan laba kotor pada tahun sebelum diberlakukannya pengurangan tarif pajak (Scholes dkk., 1992; dalam Subagyo dan Oktavia, 2010).

Penelitian oleh Guenther (1994, dalam Subagyo dan Oktavia, 2010) menemukan bukti empiris bahwa di Amerika Serikat terdapat *discretionary current accruals* negatif pada tahun sebelum diberlakukannya pengurangan tarif. Hal ini mengindikasikan adanya manajemen laba yang dilakukan perusahaan dengan menunda *earnings* pada periode sebelum diefektifkannya pengurangan tarif.

Tarif Pajak Penghasilan Badan yang diterapkan di Indonesia sebelum tahun 2009 adalah tarif pajak dengan sistem progresif, yaitu tarif pajak yang persentasenya dapat menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Seiring dengan adanya pro dan kontra tentang tarif Pajak Penghasilan Badan tersebut maka Pemerintah Indonesia mengeluarkan dua Undang-undang pajak baru yang berlaku 1 Januari 2009, salah satunya adalah Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-Undang ini mengatur beberapa perubahan mendasar dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan bagi perusahaan di Indonesia. Mulai tahun pajak 2009, tarif PPh Badan menganut sistem tarif tunggal atau *single tax* yaitu 28% dan akan menjadi 25% pada tahun 2010. Jadi berapapun penghasilan kena pajaknya, tarif yang dikenakan adalah satu yaitu 28% atau 25%. Selain itu, bagi perusahaan yang termasuk perusahaan *go public* diberikan penurunan tarif sebesar 5% dari tarif normal dengan syarat lainnya. Dengan begitu, pada tahun pajak 2009 tarif perusahaan yang masuk bursa (*go public*) sebesar 23% dan pada tahun pajak 2010 sebesar 20%.

Berubahnya tarif PPh Badan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dapat mempengaruhi perilaku perusahaan dalam mengelola laporan keuangannya serta dapat memberikan insentif kepada perusahaan untuk melakukan manajemen laba untuk memperkecil laba kena pajaknya (*taxable income*), sehingga beban pajak perusahaan di tahun sebelum diberlakukannya UU PPh yang baru juga semakin kecil. Menurut Mariawan dan Arifin (2005, dalam Sari, 2010) perubahan tarif pajak diduga membawa implikasi terhadap kinerja perusahaan, di mana implikasi tersebut bisa bersifat positif maupun bersifat negatif. Hal tersebut dikarenakan analisis kinerja perusahaan mencakup analisis rasio keuangan, dimana dengan rasio-rasio keuangan tersebut kondisi dan posisi keuangan suatu perusahaan pada saat ini dan prospeknya di masa yang akan datang dapat diketahui secara jelas oleh investor sebelum membuat keputusan investasi. Oleh karena itu, sebagian besar perusahaan pada umumnya akan melakukan manajemen laba agar laporan keuangan yang dipublikasikan dapat dipergunakan oleh investor untuk memutuskan investasi. Aktivitas manajemen laba dipengaruhi beberapa faktor antara lain profitabilitas, hutang, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan kualitas auditor (Rahmawati dan Sholikhah, 2008; dalam Christanti, 2012).

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Berdasarkan *bonus plan hypothesis* dalam teori akuntansi positif (Watts dan Zimmerman, 1986; dalam Christanti, 2012), insentif manajer pada umumnya didasarkan pada

profitabilitas perusahaan. Adanya kebijakan pemberian bonus kepada manajer jika berprestasi, menyebabkan manajer akan memilih kebijakan pencatatan laporan keuangan agar dapat mencatat laba yang lebih tinggi dari periode sebelumnya. Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan berarti manajemen dinilai efektif dan efisien dalam mengelola aset-aset yang ada untuk menghasilkan laba. Subagyo dan Octavia (2010) menunjukkan bahwa sebagai respon atas adanya perubahan tarif pajak maka perusahaan yang memperoleh laba (*profit firm*) akan memanipulasi labanya (melakukan manajemen laba) guna meminimalkan pembayaran pajak.

Hutang merupakan parameter untuk menangkap insentif dalam tindakan manajemen laba ketika terjadi pelanggaran perjanjian hutang (Klein, 2002; dalam Christanti, 2012). Menurut Wahyuni (2013) hutang berpengaruh terhadap manajemen laba, dimana semakin tinggi tingkat hutang perusahaan maka perusahaan akan semakin melakukan manajemen laba. Dalam kaitannya dengan perubahan tarif pajak, maka tarif pajak yang dikenakan akan turut berpengaruh terhadap manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Modigliani dan Miller (1996, dalam Brigham dan Houston, 2001), berpendapat bahwa hutang bermanfaat karena bunga dapat dikurangkan dalam menghitung pajak, tetapi hutang juga menimbulkan biaya yang berhubungan dengan kebangkrutan yang aktual dan potensial. Dengan demikian, semakin besar penggunaan hutang akan semakin besar beban bunga, maka

perlindungan pajak yang diperoleh perusahaan semakin besar pula dan akan memperkecil peluang untuk melakukan manajemen laba.

Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya perusahaan. Perusahaan besar biasanya memiliki biaya politik tinggi. Biaya politik muncul bertujuan untuk meminimumkan risiko. Berdasarkan *political cost hypothesis* dalam teori akuntansi positif (Watts dan Zimmerman, 1986; dalam Christanti, 2012), perusahaan besar cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat mengurangi laba periode dibandingkan perusahaan kecil. Semakin tinggi ukuran perusahaan maka semakin tinggi perusahaan melakukan manajemen laba. Hal tersebut dikarenakan semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin besar pula risiko yang dikeluarkan sehingga manajemen laba semakin besar.

Pertumbuhan perusahaan merupakan tanda perusahaan memiliki aspek yang menguntungkan dengan menunjukkan perkembangan yang baik (Wijaya dan Martani, 2011; dalam Christanti, 2012). Pertumbuhan perusahaan mempengaruhi kecenderungan perusahaan untuk mengelola laba, untuk menarik investor agar dapat menanamkan modalnya. Oleh karena itu, manajer berusaha melakukan manajemen laba untuk memperlihatkan adanya pertumbuhan perusahaan. Hal ini dapat dikarenakan pertumbuhan perusahaan yang tinggi juga berarti dapat meningkatkan pajak yang harus dibayar sehingga akan semakin sering melakukan tindakan manajemen laba.

Kualitas auditor dalam suatu perusahaan bertujuan untuk menciptakan suatu tata kelola perusahaan yang baik, efektif dan efisien sehingga tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti tetap patuh dalam hal pembayaran pajak (Wulandari, 2006). Salah satu komponen dalam *corporate governance* di perusahaan adalah kualitas auditor. Auditor merupakan pihak independen yang dapat mengurangi fleksibilitas manajemen melakukan manajemen laba. *Corporate governance* telah dijadikan alat oleh pemerintah untuk memerangi usaha penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, sehingga dengan kualitas auditor yang semakin baik maka aktivitas manajemen laba semakin kecil.

Penelitian ini menggunakan objek perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan masuk dalam peringkat LQ-45. Pemilihan perusahaan manufaktur karena di sektor manufaktur lebih banyak pos-pos dalam laporan keuangan yang memungkinkan untuk dilakukan manajemen laba. Sementara pemilihan kategori perusahaan manufaktur LQ-45 karena untuk mengetahui bagaimana respon manajemen laba dengan adanya perubahan tarif pajak pada perusahaan manufaktur yang tergolong memiliki likuiditas tinggi tersebut. Penelitian ini menggunakan periode tahun 2007-2009, karena pemerintah Indonesia telah melakukan perubahan perundang-undangan di bidang perpajakan pada tahun 2008, sehingga dapat diketahui pengaruh di periode sekitar perubahan tarif pajak yang diberlakukan tersebut.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka rumusan masalah penelitian adalah: “Apakah profitabilitas, hutang, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan kualitas auditor berpengaruh terhadap manajemen laba sebagai respon atas perubahan Tarif Pajak Tahun 2008 pada perusahaan manufaktur kategori LQ-45 di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2009?”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas, hutang, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan kualitas auditor terhadap manajemen laba sebagai respon atas perubahan Tarif Pajak Tahun 2008 pada perusahaan manufaktur kategori LQ-45 di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2009.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktik

Dapat menjadi masukan bagi investor dan kreditor dalam menganalisis kondisi keuangan perusahaan khususnya laba perusahaan yang dilaporkan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba dalam menghadapi perubahan tarif pajak

2. Manfaat Akademik

Menjadi wacana dan acuan untuk peneliti berikutnya dan diharapkan dapat menjadi referensi dalam melakukan penelitian sejenis mengenai manajemen laba dan respon atas perubahan tarif pajak penghasilan badan.

1.5. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan penelitian terdahulu, landasan teori, pengembangan hipotesis, dan model analisis penelitian.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan desain penelitian, indentifikasi variabel, definisi variabel dalam penelitian secara operasional, pengukuran variabel, jenis dan sumber data, alat dan metode pengumpulan data, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, serta teknik analisis data.

BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB 5 : SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab ini menjelaskan simpulan dari hasil analisis dan pembahasan, keterbatasan penelitian, dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.